

# MODEL JARINGAN AKTOR DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA WISATA WONOLOPO KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

Genta Paradise Purba<sup>1</sup>, Tri Yuniningsih<sup>2</sup>, Ida Hayu Dwimawanti<sup>3</sup>

Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407  
Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## Abstrak

Surat Keputusan Walikota No. 556/407 Walikota Semarang Tahun 2012 menjadi dasar penetapan Kelurahan Wonolopo sebagai Desa Wisata di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aktor, menganalisis peran aktor serta menggambarkan model jaringan aktor yang terbentuk dalam program kebijakan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif tipe deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara langsung/daring, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DISBUDPAR Kota Semarang menjadi aktor primer dan berperan sebagai *policy cerator*, fasilitator dan koordinator. Aktor primer adalah POKDARWIS, RW, dan Masyarakat Aktif berperan sebagai implementor dan akselarator. Aktor sekunder adalah Media Massa dan Akademisi berperan sebagai akselarator. Aktor tersier adalah Kecamatan, Kelurahan dan PKK berperan sebagai akselarator. Aktor kwarter adalah Masyarakat Pasif berperan sebagai kelompok sasaran dan penerima manfaat. Model jaringan aktor yang terbentuk yakni Model *Quadruple Helix* (Pemerintah, Akademisi, Masyarakat dan Media Massa). Jaringan aktor yang terbentuk belum berjalan maksimal karena sebagian aktor yang terlibat belum melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam menjalankan perannya masing-masing. Rekomendasi yakni perlu adanya koordinasi dan komunikasi oleh DISBUDPAR melalui pengadaan pertemuan antar aktor untuk mengoptimalisasi peran setiap aktor yang terlibat dan pelibatan generasi muda sebagai langkah peningkatan partisipasi masyarakat dalam promosi wisata.

**Kata Kunci:** *Pengembangan, Pariwisata, Desa Wisata, Model Jaringan Aktor.*

**THE ACTOR NETWORK MODEL IN THE DEVELOPMENT OF  
TOURISM IN THE TOURIST VILLAGE OF WONOLOPO, MIJEN  
DISTRICT, SEMARANG CITY**

***Abstract***

*Mayor's Decree Number 556/407 The Mayor of Semarang in 2012 became the basis for the determination of Wonolopo Village as a Tourism Village in the City of Semarang. This study aims to identify actors, analyze the roles of actors and describe the actor network models formed in the tourism development policy program in Wonolopo Tourism Village. The research method used is qualitative descriptive type with data collection methods direct / online interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that DISBUDPAR Semarang City becomes the primary actor and acts as a policy cerator, facilitator and coordinator. The primary actors are POKDARWIS, RW, and Active Society as implementers and accelerators. Secondary actors are Mass Media and Academics act as accelerators. Tertiary actors are the District, Kelurahan and PKK acting as accelerators. The quaternary actor is the Passive Society, which acts as the target group and beneficiaries. The actor network model that is formed is the Quadruple Helix Model (Government, Academics, Society and Mass Media). The actor network that has been formed has not run optimally because some of the actors involved have not coordinated and communicated well in carrying out their respective roles. Recommendations are the need for coordination and communication by DISBUDPAR through the holding of meetings between actors to optimize the role of each actor involved and the involvement of the younger generation as a step to increase community participation in tourism promotion.*

***Keywords:*** *Development, Tourism, Tourism Village, Actor Network Model.*

## PENDAHULUAN

*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan bentuk sebuah kerjasama dalam pembangunan yang dibentuk untuk menggantikan MDGs yang berlaku sejak 2015-2030, dan disetujui oleh kurang lebih 190 negara di dunia. SDGs tersebut memuat 17 tujuan dan ada 169 sasaran pembangunan yang berupaya menanggulangi ketertinggalan pembangunan banyak negara di dunia. Pariwisata adalah salah satu bidang yang termasuk fokus sasaran oleh SDGs. Pengembangan di sektor industri pariwisata semestinya dilaksanakan secara optimal, terorientasi serta profesional yang bertujuan untuk pembangunan dan pemanfaatan potensi pariwisata yang mampu berkontribusi besar bagi perekonomian nasional (BULETIN APBN, 2016).

Di Jawa Tengah, pengembangan pariwisata melalui desa wisata merupakan sektor yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang dan pemerintah daerah. Adapun desa wisata yang sedang dikembangkan oleh pihak pemerintah Kota Semarang adalah Desa Wisata Wonolopo. Kelurahan Wonolopo adalah satu dari berapa banyak kelurahan di Kota Semarang yang mendapat SK sebagai desa wisata. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota No. 556/407 Walikota Semarang

tanggal 21 Desember Tahun 2012 (Pemerintah Kota Semarang, 2012), Kota Semarang mempunyai 3 desa wisata yang terletak di 2 Kecamatan yaitu Kelurahan Nongkosawit dan Kelurahan Kandri di Kecamatan Gunung Pati dan di Kecamatan Mijen yang berada di Kelurahan Wonolopo.

Nuryanti (1992) (dalam Made et al, 2013), mengemukakan bahwa desa wisata adalah wujud dari berbagai tempat indah, akomodasi dan fasilitas penunjang, di tunjukkan dalam struktur kehidupan masyarakat setempat, serta terhubung langsung dengan adat istiadat dan budaya masyarakat pada periode tersebut.

Desa Wisata Wonolopo adalah salah satu dari beberapa kelurahan yang ada di Kota Semarang yang mendapat SK sebagai desa wisata. Desa wisata Wonolopo terletak di Kecamatan Mijen yang melewati jalan raya Semarang-Boja ke arah Kabupaten Kendal. Untuk menuju desa wisata ini wisatawan cukup mengeluarkan biaya sedikit yakni dengan hanya menggunakan bus ke Boja ataupun Cankiran atau menaiki Bus Trans Semarang (BRT) untuk bisa sampai di Desa Wisata Wonolopo. Keberhasilan pembangunan desa wisata di pengaruhi oleh jumlah penerimaan serta dukungan masyarakat setempat (Wearing, 2001).

Wearing (2001) menjelaskan bahwa masyarakat sebagai salah satu aktor dalam

pengembangan pariwisata sama-sama memiliki peranan dengan pihak pemerintah ataupun swasta. Oleh karena hal tersebut, sangat dibutuhkan hubungan kerjasama yang saling terkait antara pemerintah, swasta, masyarakat serta aktor terkait lainnya. Penerapan ikatan antar aktor harus jelas dan kedudukan serta tanggung jawab seluruh pihak. Dalam konteks pembangunan desa wisata tidak sedikit ditemukan konflik antar pemangku kepentingan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan pariwisata dapat mempengaruhi partisipasi serta kesejahteraan warga sekitar, budaya serta kelestarian area yang bersumber pada jumlah kunjungan wisatawan (Chang et al, 2012). Hilangnya kerja sama antar beberapa aktor, kurangnya partisipasi masyarakat, serta minimnya regulasi pemerintah menjadi permasalahan yang sering terjadi (Choi & Sirakaya, 2006). Oleh karena itu perlu untuk diketahui serta dipahami kedudukan setiap aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata. Hubungan antar aktor tersebut biasanya akan membentuk sebuah jaringan yang sering disebut jaringan aktor. Sama dengan desa wisata lainnya, desa wisata Wonolopo juga melibatkan banyak aktor dalam segi pengembangannya, namun jika dilihat dari observasi pada penelitian terdahulu menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa konflik yang terjadi, sebagian masyarakat yang belum

memahami perannya sebagai apa dalam pengembangan pariwisata desa wisata dan hal menunjukkan jaringan aktor yang ada di desa wisata Wonolopo belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan pemaparan di atas disebutkan bahwa setiap aktor memiliki kedudukan serta peran mereka masing-masing dalam kegiatan pariwisata desa wisata, oleh karena itu melihat fenomena di atas, bahwa masalah penelitian berupa jaringan aktor yang belum berjalan maksimal dalam pengembangan pariwisata desa wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang, sehingga penelitian ini akan menjawab pertanyaan diantaranya:

1. Identifikasi aktor berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan aktor dalam pengembangan pariwisata desa wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang
2. Bagaimana peran aktor dalam pengembangan pariwisata desa wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang
3. Model *Quadruple Helix* dalam pengembangan pariwisata desa wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Kebijakan Publik**

Islamy (2009:19) melansir definisi Thomas R Dye serta mengartikan

kebijakan publik selaku “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang pemerintah pilih untuk jalani ataupun tidak jalani). Pengertian ini menekankan bahwa kebijakan publik ialah perwujudan dari “aksi”, tidak hanya semata-mata ungkapan kemauan pemerintah ataupun pejabat publik. Tidak hanya itu, opsi pemerintah untuk tidak melaksanakan sesuatu ialah kebijakan publik sebab mempunyai pengaruh (sama dengan opsi pemerintah terhadap sesuatu).

Subarsono (2009) (dalam Irwan Abdu, 2017:25) mengutip dari Michael Howlet dan M. Ramesh, jika tahapan kebijakan publik meliputi 5 tahap antara lain:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), sekalipun masalah tersebut dapat menarik perhatian pemerintah
2. Perumusan kebijakan (*policy formulation*), yaitu tahap dimana pemerintah merumuskan rencana kebijakan
3. Pengambilan keputusan (*decision making*), adalah tahap dimana pemerintah memutuskan untuk mengambil tindakan atau tidak
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), tahap

pelaksanaan kebijakan untuk mencapai hasil

5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yaitu proses pengawalan dan evaluasi terhadap kinerja kebijakan.

## **b. Jejaring Kebijakan**

Jejaring kebijakan dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Pertama, mereka digambarkan sebagai para aktor. Kedua, hubungan antar aktor (*linkages*). Ketiga, batas (*boundary*) Kenis & Schneider, (1991) (dalam Carlsson, 2000).

Sabatier (dalam Suwitri, 2005:4-5) mempelajari jejaring kebijakan dan menyebutnya aliansi advokasi, yaitu sekelompok pembuat keputusan dalam subsistem kebijakan. Para aktor dalam koalisi advokasi terdiri dari aktor-aktor dari berbagai instansi swasta dan pemerintah di semua tingkatan organisasi pemerintah yang berpartisipasi berdasarkan keyakinan dalam mencapai tujuan.

Dari sudut pandang Viney (dalam Suwitri, 2011) aktor ataupun pemangku kepentingan bisa dibedakan jadi 4 jenis, adalah: a) Primer: aktor dengan pengaruh besar serta sangat berfungsi berarti, merekrut aktor dalam jenis ini lewat *partner*; b) Sekunder: aktor dengan pengaruh besar namun kepentingan

rendah, merekrut aktor tersebut lewat *consult*; c) Sekunder kedua ataupun tersier, ialah aktor dengan pengaruh rendah namun mempunyai tingkatan kepentingan yang besar, merekrut aktor tersebut lewat metode *inform*; d) Aktor sekunder ketiga ataupun kwarter, ialah aktor dengan pengaruh serta kepentingan rendah, merekrut aktor tersebut lewat *control*.

### c. Peran Aktor

Peran aktor menurut Riant Nugroho (dalam Fitri & Hardi, 2017) aktor dalam program pembangunan diklasifikasikan menurut kedudukannya, adalah:

- 1) Pembuat kebijakan (*Policy Creator*) ialah pemangku kepentingan yang berfungsi selaku pengambil keputusan serta penentu suatu kebijakan
- 2) Koordinator ialah pemangku kepentingan yang berfungsi mengkoordinasikan pemangku kepentingan terkait lainnya
- 3) Fasilitator ialah pemangku kepentingan yang berfungsi untuk mewedahi serta memenuhi kebutuhan kelompok sasaran
- 4) Pelaksana (Implementor) ialah pemangku kepentingan yang melakukan kebijakan termasuk kelompok sasaran

5) Akselarator ialah pemangku kepentingan yang berfungsi dalam percepatan serta berkontribusi supaya program bisa berjalan sesuai dengan tujuan, bahkan bisa menggapai tujuan dengan lebih cepat.

### d. Model Jaringan Aktor

Michel Callon, Bruno Latour, serta John Law pada tahun 1980-an (dalam Johannes Eka, 2013: 4): Model Jaringan Aktor adalah bentuk-bentuk dari jaringan aktor yang ada dan dibedakan berdasarkan jumlah aktor dalam jaringan yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing:

- 1) Model *Triple Helix*: (Universitas, Industri, Pemerintah)
- 2) Model *Quadruple Helix*: (Universitas, Industri, Pemerintah, dan masyarakat sipil)
- 3) Model *Penta Helix*: (Academician, Business, Community, Government dan Mass Media) biasa disingkat ABCGM.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bertipe deskriptif. Pemilihan Desa Wisata Wonolopo sebagai lokus penelitian karena Desa Wisata

Wonolopo merupakan salah satu kelurahan dari beberapa kelurahan yang ada di Kota Semarang yang ditetapkan sebagai desa wisata melalui SK Walikota No. 556/407 tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (data bersumber dari informan) dan data sekunder (buku pustaka, catatan ilmiah, jurnal dan artikel ilmiah serta laporan, arsip ataupun dokumen lainnya). Informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* dan teknik *snowball*, yaitu teknik memilih sampel secara sadar sesuai kebutuhan dan pemilihan informan kedua dan selanjutnya berdasarkan informasi dan rekomendasi dari informan sebelumnya sampai seterusnya. Informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: Staff Pegawai Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Pengelola Desa Wisata/ POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata), Pegawai Kantor Kecamatan Mijen, Kepala/Pegawai Kantor kelurahan Wonolopo, Ketua RW, Ketua/Pengurus PKK, Masyarakat Kelurahan Wonolopo, Pegawai/Pengelola P2BK UNISBANK, Wartawan Suara Merdeka Semarang. Data lapangan dikumpulkan melalui cara wawancara langsung, *daring* dan/atau telepon, dokumentasi serta observasi). Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan cara mengolah data, mengorganisasi data, mengklasifikasikannya, menyusunnya,

mencari dan menemukan pola, serta memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain (dalam Moleong, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Identifikasi Aktor Berdasarkan Tingkat Pengaruh Dan Kepentingan Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang

Aktor dapat dikategorikan berdasarkan tingkat pengaruh serta kepentingannya sama seperti dengan yang dikemukakan oleh Viney (dalam Suwitri, 2011) yakni:

#### a. Aktor Primer

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang  
Memiliki pengaruh yang besar terlihat dari respons masyarakat yang sangat positif dan ketika ingin melakukan sesuatu mereka (pegiat wisata atau POKDARWIS) terkadang membutuhkan masukan dari DISBUDPAR dan DISBUDPAR hadir bahkan sering turun langsung ke lapangan untuk memberikan masukan, selain itu DISBUDPAR juga memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap pengembangan

pariwisata Wonolopo hal ini berkaitan dengan harapan dari DISBUDPAR agar Desa Wisata Wonolopo semakin berkembang melalui pengadaan anggaran setiap tahunnya dan pengadaan pembinaan terhadap pegiat wisata yang ada agar Desa Wisata Wonolopo.

## 2. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)

Tingkat pengaruh yang diberikan cukup besar terhadap pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo serta memiliki kepentingan yang tinggi di dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Wonolopo melalui upaya peningkatan wawasan dan kemampuan masyarakat seperti mengajak masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi terkait dengan kepariwisataan.

## 3. Rukun Warga (RW)

Ketua RW memiliki pengaruh yang tinggi dalam mengajak serta mengarahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kepariwisataan serta memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, hal ini berdasarkan posisi ketua RW sebagai pemimpin yang terdekat dengan masyarakat dan

menjadi bagian dari pelaksana pengembangan kepariwisataan yang ada di Desa Wisata Wonolopo.

## 4. Masyarakat Aktif

Menyediakan lahan untuk pengembangan area wisata, terlibat sebagai pelaku ekowisata, dan menjadi penyedia akomodasi pariwisata sehingga masyarakat aktif dalam hal ini memiliki kepentingan yang tinggi dan juga pengaruh yang tinggi sebagai aktor pelaksanaan program pengembangan pariwisata Wonolopo

### **b. Aktor Sekunder**

#### 1. Media Massa

Melakukan pemberitaan terkait kegiatan kepariwisataan yang ada di Wonolopo yang secara tidak langsung membantu memperkenalkan dan mempromosikan keberadaan wisata Wonolopo bagi orang banyak sehingga memberikan dampak dan pengaruh yang kuat bagi pengembangan yang sedang di laksanakan sedangkan untuk tingkat kepentingan sendiri pihak media massa bisa terbilang rendah karena memang dalam keberjalanannya pihak media massa tidak memiliki

tingkat kepentingan yang begitu tinggi.

## 2. Akademisi

Keterlibatan yang dilakukan oleh UNISBANK memberikan pengaruh yang besar bagi pengembangan wisata yang ada di desa wisata Wonolopo yang dilakukan melalui pendampingan yang berfokus pada pembinaan SDM termasuk para penggerak dan pelaku wisata yang berada di Desa Wisata Wonolopo, sehingga demikian UNISBANK menjadi aktor sekunder dengan pengaruh tinggi namun rendah dari segi kepentingan.

## c. Aktor Tersier

### 1. Kecamatan

Dalam hal tingkat pengaruh yang diberikan masih terbilang rendah dalam mendorong masyarakat dan aktor-aktor lainnya yang terlibat untuk melaksanakan tugas dan perannya dalam mengembangkan Desa Wisata Wonolopo namun demikian pemerintah kecamatan memiliki tingkat kepentingan yang terbilang tinggi dari pengembangan pariwisata yang ada.

### 2. Kelurahan

Pengaruh kelurahan yang rendah dalam melakukan perannya yang tidak memiliki kekuatan atau power guna mengintruksikan para pegiat

wisata dan masyarakat untuk menjadi satu dalam mengembangkan pariwisata Wonolopo namun jika dilihat dari tingkat kepentingannya, pihak Kelurahan Wonolopo sangat tinggi hal ini terlihat dari keinginan kelurahan agar masyarakat ikut berperan aktif serta Wisata Wonolopo memiliki infrastruktur yang jelas dan lengkap.

### 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

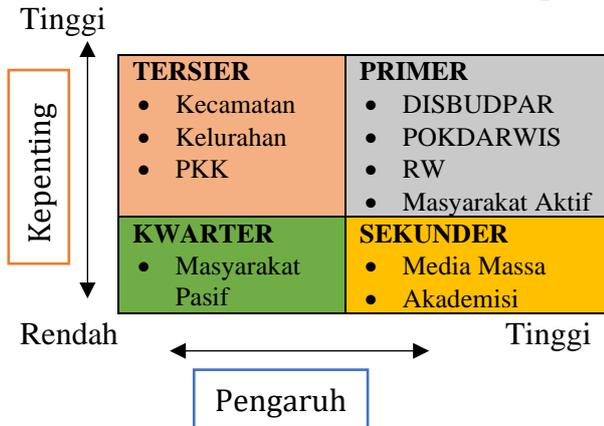
Dapat dilihat dari keikutsertaan sebagian dari anggota PKK menjadi pengurus dari POKDARWIS yang notabene sebagai pegiat wisata. Dengan adanya PKK ini menjadi sebuah organisasi yang hadir untuk menjadi perpanjangan tangan sebagai pembawa informasi dari pemerintahan di atasnya seperti pemerintah kota dan kecamatan yang kemudian disampaikan ditingkat kelurahan.

## d. Aktor Kwartir

### 1. Masyarakat Pasif

Tidak berperan aktif serta tidak berpengaruh besar dalam implementasi kebijakan program pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo.

**Tabel 3.1 Identifikasi Aktor yang Terlibat Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo**



Sumber: Olah Data Peneliti, (2021)

## 2. Analisis Peran Aktor Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang

1. *Policy Creator*/Pembuat Kebijakan
  - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang  
 Sebagai salah satu instansi pemerintahan di tingkat pemerintah kota, DISBUDPAR telah melaksanakan perannya sebagai *policy creator* yakni mewakili Pemerintah Kota Semarang sebagai *policy creator*/pembuat kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo dengan dikeluarkannya SK Walikota No. 556/407 Walikota Semarang tentang penetapan Kelurahan Wonolopo sebagai desa wisata dan yang menetapkan anggaran bagi

pengembangan pariwisata setiap tahunnya.

2. Koordinator
  - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang  
 Selain menjadi pembuat kebijakan, DISBUDPAR juga berperan sebagai koordinator yakni aktor yang berperan dalam mengkoordinasikan antar aktor serta menjadi penghubung antar aktor yang ada dalam pengembangan pariwisata Wonolopo, namun sesuai dengan fakta yang ada dilapangan dapat di ketahui bahwa peran DISBUDPAR sebagai koordinator belum terlaksana secara maksimal hal ini terbukti dari koordinasi serta komunikasi beberapa aktor yang belum berjalan dengan baik seperti antar pemerintah Kelurahan Wonolopo dengan para pegiat wisata lainnya yang ada di Desa Wisata Wonolpo sehingga menjadi penghambat pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo yang dimana jika DISBUDPAR melaksanakan perannya sebagai koordinator dengan maksimal maka akan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar beberapa aktor tersebut menjadi maksimal.

### 3. Fasilitator

#### a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kota Semarang

Hal ini di tunjukkan melalui pengadaan anggaran bagi pariwisata di Kota Semarang termasuk Deswita dan pemberian bantuan berupa bantuan fisik maupun non-fisik seperti barang yang dibutuhkan dalam memperindah objek wisata yang ada serta pengadaan pembinaan dan pelatihan-pelatihan bagi para penggerak wisata guna meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka dalam menjalankan kepariwisataan di Desa Wisata Wonolopo serta pengadaan anggaran bagi pariwisata di Kota Semarang secara keseluruhan.

### 4. Implementor

#### a. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Wonolopo dan Manggar

Menjadi sebuah komunitas yang diakui keberadaannya setelah dikeluarkannya SK Walikota Semarang No. 556/407 dan menjadi aktor pelaksana yang terdekat dengan kelompok sasaran. POKDARWIS sebagai aktor pelaksana melaksanakan perannya melalui pengadaan sosialisasi

kepada masyarakat serta berperan dalam mempromosikan lokasi-lokasi wisata yang ada dan apa yang menjadi hasil produk masyarakat Wonolopo, seperti *souvenir* dan kegiatan-kegiatan khas yang dapat di tampilkan oleh masyarakat bagi pengunjung. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa POKDARWIS sudah cukup baik dalam menjalankan perannya dalam membantu mengembangkan pariwisata yang ada namun masih belum optimal dari segi koordinasi dan komunikasi dengan aktor lainnya.

#### b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Wonolopo

Keberadaan dari PKK di Kelurahan Wonolopo juga ikut berperan dalam mengembangkan potensi-potensi baik dari segi pariwisata maupun dari segi sumber daya masyarakatnya, seperti menjadi perwakilan dalam kegiatan yang dilaksanakan di luar Kota Semarang, misalnya lomba keterampilan atau lomba makanan. Jika dilihat dari pelaksanaan peran serta komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh PKK sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik

c. RW

RW memiliki peran yang besar dalam mengembangkan objek wisata yang ada melalui pemberian arahan serta masukan bagi masyarakat dalam menjalankan UMKM yang dimiliki oleh masyarakat termasuk dalam membantu mengembangkan produk-produk hasil karya masyarakat itu sendiri serta bertanggung jawab atas keberjalanan dari kegiatan kepariwisataan yang di jalankan oleh pelaku wisata di Desa Wisata Wonolopo sehingga peran RW sebagai implementor sudah dapat dikatakan baik

5. Akselarator

a. Kecamatan Mijen

Pemerintah Kecamatan Mijen dalam hal ini berperan sebagai akselarator dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah percepatan pengembangan desa wisata dari segi SDM nya dengan mengadakan lomba desa wisata dan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Namun menurut data dilapangan menunjukkan bahwa peran dari kecamatan belum optimal dan masih banyak hal-hal yang perlu dikembangkan dan

dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait, hal ini akibat dari jarak jauh dari pusat kota sehingga untuk koordinasi butuh waktu yang cukup lama.

b. Kelurahan Wonolopo

Peran akselarator oleh kelurahan di tunjukkan melalui aktivitas laporan masyarakat ke pihak kelurahan mengenai suatu hal yang perlu untuk di tindaklanjuti terkait objek wisata kemudian oleh pihak kelurahan akan menyampaikannya ke pihak pemerintah kota yang pada akhirnya akan ditindak lanjuti dengan pemberian dalam bentuk barang atau material. Adanya SK Walikota No. 556/407 Walikota Semarang Tahun 2012 menandakan pihak kelurahan memiliki kewenangan sebagai pembuat kebijakan karena sudah ada SK yg menetapkan Wonolopo sebagai Desa wisata, tetapi kebijakan tersebut harus bersinergi dengan pemerintah di atasnya dan yang terjadi yakni Kelurahan Wonolopo dengan pemerintah di atasnya belum bersinergi sehingga kelurahan tidak memiliki *power* yang kuat dalam mengorganisasikan pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

c. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Wonolopo dan Manggar

Melibatkan dirinya dan berperan sebagai aktor yang menjalankan peran guna mempercepat serta berkontribusi agar program pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan tujuan, bahkan dapat mencapai tujuan dengan lebih cepat. POKDARIWS jika dilihat dari pelaksanaan peran sudah melaksanakan perannya namun masih belum maksimal terutama dengan terbaginya POKDARWIS yang ada di Desa Wisata Wonolopo menjadi dua kelompok yakni POKDARWIS Wonolopo dan POKDARWIS Manggar yang mengakibatkan sistem kerja belum terintegrasi dengan baik dan mengakibatkan adanya ketimpangan dalam pengelolaan objek wisata yang ada di Desa Wisata Wonolopo

d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Wonolopo

Menjadi aktor penghubung antara pemerintah setempat dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh

PKK dan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan dibidang kepariwisataan dengan ikut serta menjadi anggota atau pengurus dari Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) yang ada di Desa Wisata Wonolopo. PKK Kelurahan Wonolopo dalam hal ini telah melaksanakan tugasnya dengan optimal hal ini terlihat dari berjalannya kesepuluh program PKK yang ada serta keaktifan anggota PKK dalam membantu mengembangkan kepariwisataan yang ada di Wonolopo seperti ikut dalam kegiatan lomba wisata dan lomba makanan hingga tingkat provinsi

e. RW

Menjadi pihak yang membantu memperlancar serta berkontribusi agar program yang sedang di canangkan dapat tercapai dengan cepat. Selain sebagai pemimpin di tingkat RW, aktor ini telah melakukan perannya dengan baik dengan turut serta memberikan arahan serta masukan untuk masyarakat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.

f. Masyarakat Aktif

Masyarakat di Desa Wisata Wonolopo terbagi menjadi

beberapa kategori diantaranya: Pemilik Objek Wisata, Pemandu Wisata dan Pelaku UMKM/Ekowisata. Dalam hal ini pemandu wisata, pemilik objek wisata dan pelaku UMKM berperan sebagai akselerator yakni aktor yang berkontribusi mempercepat dalam program pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo dengan menyediakan area wisata, akomodasi serta kebutuhan kegiatan kepariwisataan lainnya

- g. Media Massa (Suara Merdeka, Indosiar dan Metro TV Semarang)
- Media Massa dalam hal mengembangkan pariwisata Wonolopo sangat besar, sebagai media yang memberitakan kejadian atau kegiatan-kegiatan yang ada di Wonolopo tentunya hal ini menjadi bentuk promosi wisata bagi orang diluar Wonolopo untuk mengetahui objek wisata yang ada di Wonolopo dan menjadi sarana informasi bagi pemerintah setempat untuk kemudian mengetahui keadaan terkini dari Wisata Wonolopo, dengan begitu hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi keberlanjutan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo

- h. Universitas atau Akademisi (UNISBANK dan UNNES)

Peranannya dalam mendampingi para penggerak dan pegiat wisata yang ada di Desa Wisata Wonolopo dapat membantu percepatan pencapaian program pengembangan pariwisata di wilayah tersebut dengan *grand design* yang telah disiapkan. Peran akselerator dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo juga di perankan oleh Universitas Negeri Semarang (UNNES) melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke kampung tematik yang ada di Desa Wisata Wonolopo.

6. Kelompok Sasaran dan Penerima Manfaat

- a. Masyarakat Pasif

Yaitu masyarakat yang tidak memiliki peran aktif dalam membantu mempercepat program pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo dalam hal ini masyarakat tersebut masih hanya sebagai penikmat kegiatan wisata yang ada dan tidak sepenuhnya menjalankan perannya dari adanya kegiatan kepariwisataan yang ada di daerah mereka sendiri karena hal tersebut mengakibatkan manfaat dari kegiatan pariwisata yang ada tidak di terima sepenuhnya oleh

kelompok masyarakat pasif tersebut.

### **3. Model Quadruple Helix Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang**

Menurut teori helix, dalam model yang pertama yakni *Tiple Helix* (Etzkowitz dan Leydesdorff, 1995) dikatakan bahwa ada 3 aktor yang bergabung di dalamnya, diantaranya: sektor industri adalah aktor yang bertanggung jawab atas inovasi, kemudian sektor universitas yakni aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan dan yang terakhir yakni sektor pemerintah menjadi aktor yang bertanggung jawab atas kerangka peraturan serta dukungan keuangan atas implementasi suatu kebijakan inovasi. Dalam model ini, universitas atau akademisi menjadi aktor yang bertanggung jawab untuk menciptakan pengetahuan. Sama seperti dengan yang terjadi di Desa Wisata Wonolopo, Universitas menjadi aktor yang ikut berperan dalam membantu pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menjadi salah satu universitas yang melibatkan dirinya

dalam membantu mengembangkan pariwisata Desa Wisata Wonolopo. Beberapa bentuk pendampingan yang dilakukan adalah pendampingan bagi para penggerak wisata (POKDARWIS dan pemandu wisata), pendampingan terhadap pelaku UMKM atau pelaku ekowisata serta pendampingan terhadap beberapa hal yang menjadi kebutuhan masyarakat desa wisata namun tidak bisa lakukan sendiri agar kemudian didampingi oleh pihak akademisi.

Universitas Negeri Semarang sebagai aktor dari segi akademisi juga turut serta dalam membantu mengembangkan pariwisata Desa Wisata Wonolopo. Sebagai akademisi yang menciptakan pengetahuan, UNNES merealisasikan perannya menurut teori helix melalui kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) yang dimana kegiatan KKN ini merupakan bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat atas apa yang telah di peroleh selama kuliah sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing mahasiswa dengan harapan akan memberikan wawasan atau pengetahuan baru bagi masyarakat. Kegiatan KKN oleh mahasiswa UNNES tersebut dilakukan di kampung tematik yang

ada di Desa Wisata Wonolopo seperti di Kampung Jamu di RW 10 dan lokasi-lokasi lainnya yang ada di Desa Wisata Wonolopo.

Menurut teori Model Triple Helix, pemerintah adalah aktor yang memberikan kerangka peraturan dan dukungan keuangan untuk defenisi dan implementasi strategi dan kebijakan inovasi. Seperti yang terlaksana di Desa Wisata Wonolopo, peran pemerintah tersebut ditunjukkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota No. 556/407 Walikota Semarang Tahun 2012 Tentang Penetapan Kelurahan Wonolopo sebagai Desa Wisata di Kota Semarang yang dilaksanakan oleh DISBUDPAR Kota Semarang. Dikeluarkannya SK tersebut menjadi awal dari kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata Wonolopo. DISBUDPAR sebagai pemerintah kota memiliki tugas dan tanggung jawab atas pengembangan pariwisata yang ada baik ditingkat kota hingga ke daerah. DISBUDPAR Kota Semarang memiliki bidang tersendiri yang menangani di bidang kelembagaan tentang pekerjaan masyarakat, kegiatan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo merupakan bagian dari hal tersebut yang di dalamnya terdapat Kelompok Sadar

Wisata (POKDARWIS), POKDARWIS ini yang kemudian oleh bidang kelembagaan tersebut mengembangkan dan membina sesuai tupoksi yang dimilikinya.

Terkait dengan keterlibatan pemerintah, Pemerintah Kecamatan Mijen menjadi bagian dari pemerintah di tingkat kecamatan yang ikut serta mengembangkan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo yang merupakan bagian dari daerah administrasi Kecamatan Mijen. Keikutsertaan pemerintah Kecamatan Mijen diwujudkan melalui perannya sebagai pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah kecamatan dan melakukan komunikasi dengan pemerintah kota. Melaksanakan kegiatan seperti lomba desa wisata dan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata membuktikan bahwa Pemerintah Kecamatan Mijen berperan sebagai akselarator yakni membantu percepatan pengembangan pariwisata di Desa Wisata Wonolopo.

Turun setingkat dibawahnya, Pemerintah Kelurahan Wonolopo menyebutkan bahwa pihak kelurahan juga turut serta dalam mengembangkan pariwisata Wonolopo. Pemerintah Kelurahan Wonolopo menjadi penghubung

antara pemerintah dengan masyarakat terutama dalam pengajuan pengadaan barang atau fasilitas yang dibutuhkan dalam kegiatan kepariwisataan. Peran akselarator oleh kelurahan tersebut di tunjukkan melalui aktivitas laporan masyarakat ke pihak kelurahan mengenai suatu hal yang perlu untuk di tindaklanjuti terkait objek wisata, kemudian oleh pihak kelurahan akan menyampaikannya ke pihak pemerintah kota yang pada akhirnya akan ditindak lanjuti dengan pemberian dalam bentuk barang atau material.

Industri atau swasta menjadi sektor ketiga dalam teori Model Triple Helix, industri di artikan sebagai aktor yang bertanggung jawab atas inovasi. Namun jika dilihat dengan yang terjadi di Desa Wisata Wonolopo, hingga saat ini keterlibatan dari sektor swasta belum ada. Keadaan ini didapat melalui fakta yang ada di lapangan oleh peneliti yang dilakukan melalui wawancara ke beberapa informan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo. Menurut hasil wawancara dengan beberapa informan tersebut dapat di simpulkan hal-hal yang dianggap menjadi alasan sektor swasta/industri belum melibatkan dirinya dalam

pengembangan pariwisata Wonolopo diantaranya:

1. Pihak swasta belum mengetahui adanya potensi wisata di Desa Wisata Wonolopo;
2. Pemerintah atau penggerak wisata belum mengerti “jalannya” harus bagaimana dan melalui apa untuk mendapatkan investor;
3. Pemerintah atau penggerak wisata belum mengetahui kriteria yang bagaimana yang di harapkan oleh investor;
4. Pihak Investor/swasta berpikir kerugian, dimana biasanya pihak swasta mau masuk ke tempat wisata jika mereka melihat ada potensi untuk mendatangkan keuntungan;
5. Pengertian investor/swasta yang masih rancu dari sudut pandang masyarakat itu sendiri, dimana mereka menganggap bahwa investor sebagai pihak yang dapat memberi modal atau membangun sesuatu terkait wisata di daerah mereka namun keuntungan yang diperoleh disimpan oleh mereka sendiri tanpa harus

memberikannya ke pihak investor

Seiring dengan bertambahnya waktu, teori helix juga ikut mengalami perubahan ke tahap yang lebih kompleks. Perubahan yang terjadi yakni pada model jaringan aktor menurut teori helix tersebut dimana pada model yang selanjutnya di sebut dengan Model *Quadruple Helix*, dalam model ini peran masyarakat kemudian ditetapkan dan menjadi aktor yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan inovasi. Dalam teori model ini, masyarakat tidak hanya menggunakan dan mengaplikasikan ilmu, dan membutuhkan inovasi berupa barang dan jasa, tetapi juga sebagai bagian aktif dari sistem inovasi tersebut. Model *Quadruple Helix* merupakan sebuah konsep perpaduan antara aktor seperti universitas, swasta, pemerintah dan masyarakat yang dimana setiap aktor memiliki peranannya masing-masing yang sama untuk mendorong inovasi dan kreatifitas. Berkaitan dengan model tersebut, masyarakat dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat dari adanya sebuah implementasi kebijakan inovasi namun juga ikut melaksanakan perannya dalam

mendorong penciptaan sebuah inovasi. Berbagai kegiatan serta aktivitas kepariwisataan sudah dijalankan oleh masyarakat, diantaranya sebagai pemilik wisata dan pelaku UMKM atau ekowisata Desa Wisata Wonolopo.

Rukun Warga (RW) menjadi pimpinan terdekat dengan masyarakat. Dalam pengembangan pariwisata yang ada di Desa Wisata Wonolopo, Rukun Warga atau RW mengikutsertakan pihaknya sebagai salah satu aktor yang mewujudkan keterlibatannya melalui pemberian arahan serta masukan bagi masyarakat dalam menjalankan UMKM yang dimiliki oleh masyarakat termasuk didalamnya membantu mengembangkan produk-produk hasil karya masyarakat.

Desa Wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang menjadi desa wisata yang beruntung, pasalnya desa wisata ini memiliki komunitas yang tidak semua daerah wisata miliki yakni komunitas yang di sebut dengan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Di Desa Wisata Wonolopo sendiri terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni POKDARWIS Wonolopo dan POKDARWIS Manggar. Walau terbagi menjadi 2 (dua) kelompok namun mereka memiliki tujuan yang sama serta aktivitas yang sama yakni berperan sebagai penggerak

wisata serta menjadi pihak yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata di sekitar destinasi pariwisata. Secara umum, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) merupakan salah satu komponen yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang berperan lebih dan berkontribusi penting dalam mengembangkan kepariwisataan di daerahnya. Karena peran serta kontribusinya yang besar, keberadaan dari POKDARWIS ini harus terus didukung dan dibina guna meningkatkan kemampuan serta keaktifan mereka dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membentuk lingkungan serta suasana kondusif dalam dunia pariwisata di daerahnya. Namun, jika dilihat dari segi kemajuan kelompoknya, POKDARWIS Manggar memiliki kemajuan yang lebih dibandingkan dengan POKDARWIS Wonolopo. Adanya perbedaan kemajuan antar POKDARWIS Wonolopo dan Manggar tersebut tak jarang mengakibatkan pengelolaan objek wisata mengalami ketimpangan keberhasilan pengelolaan objek wisata antar wilayah yang dikelola oleh kedua POKDARWIS. Selain karena terbaginya POKDARWIS di atas, tingkat keberhasilan pengelolaan objek wisata

juga di pengaruhi oleh jenis kepemilikan objek wisata yang ada di desa wisata Wonolopo yakni masih milik pribadi atau perorangan oleh masyarakat itu sendiri hal ini diakibatkan karena jenis objek wisata yang ada di desa wisata Wonolopo adalah sebagian besar wisata buatan oleh masyarakat itu sendiri hal ini juga yang mengakibatkan pihak POKDARWIS tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk mengelola secara penuh objek-objek wisata yang ada di Desa Wisata Wonolopo. Adanya tuntutan agar terus berkembang, POKDARWIS yang ada di Wonolopo beberapa tahun terakhir ini sudah mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti yang dilakukan oleh DISBUDPAR dan Kecamatan Mijen kedua pihak ini sebagai perwakilan dari sektor pemerintah sudah melakukan pembinaan terhadap POKDARWIS serta penggerak wisata lainnya yang memiliki kontribusi meningkatkan daya tarik dari destinasi wisata yang ada. Selain itu, Universitas Stikubank (UNISBANK) menjadi salah satu universitas di Kota Semarang yang menjadi perwakilan dari sektor akademisi yang juga melakukan pendampingan terhadap POKDARWIS yang berada di Desa Wisata Wonolopo.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Wisata Wonolopo juga turut serta dalam pelaksanaan program pengembangan Desa Wisata Wonolopo. Keterlibatannya tersebut diwujudkan melalui beberapa dari anggota PKK yang kemudian menjadi anggota serta pengurus dari POKDARWIS di Wonolopo. PKK ini juga menjadi perpanjangan tangan sebagai pembawa informasi dari pemerintahan di atasnya seperti pemerintah kota dan kecamatan yang kemudian disampaikan ditingkat kelurahan hingga sampai ke telinga masyarakat.

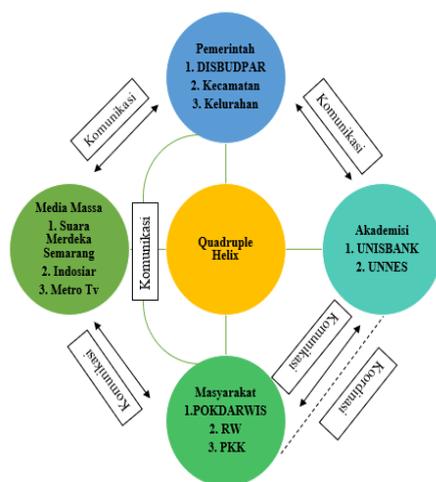
Model *Penta Helix* adalah model ketiga dari teori helix. Pada model ini, jumlah aktor yang telah tergabung serta terlibat di dalamnya yakni sebanyak 5 aktor. Aktor-aktor tersebut diantaranya: Industri, Universitas, Pemerintah, Masyarakat dan yang terakhir adalah Media Massa. Model ini juga sering disebut sebagai model yang paling cocok untuk isu multistakeholder, karna setiap *stakeholder* mempresentasikan berbagai kepentingan suatu lokasi dan isu. Sama dengan aktor-aktor lainnya yang ada di dua model jaringan aktor sebelumnya, sektor media massa juga mempunyai peran yang cukup penting dengan aktor lainnya yang lebih dulu

bergabung membentuk suatu jaringan aktor. Dalam teori model *Penta Helix*, media massa diartikan sebagai pemicu publik untuk memberikan tekanan kepada pemerintah, sehingga menjadikan urusan publik (isu) menjadi policy output atau manifestasi nyata dari kebijakan publik. Peran media massa begitu penting untuk menarik perhatian, memprovokasi aksi, melemahkan oposisi, dan menunjukkan kekuatan komitmen dan dukungan.

Jika dikaitkan dengan pengembangan pariwisata yang terjadi di Desa Wisata Wonolopo, peran media massa dapat kita jumpai di dalamnya. Peran serta keterlibatannya direalisasikan dalam bentuk pemberitaan kegiatan-kegiatan kepariwisataan yang berada di Desa Wisata Wonolopo. Tidak hanya Suara Merdeka Semarang, media massa lain yang berbentuk berita siaran televisi juga pernah dilakukan di Desa Wisata Wonolopo seperti contoh “Shooting Film Semarak Indosiar di Embung Wonolopo”, kegiatan ini adalah pemberitaan ke media sosial yang dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak pengembang objek wisata Embung Wonolopo yang kemudian di siarkan di siaran televisi terkait. Selain sebagai aktor yang memiliki peran memberitakan, menurut

hasil penelitian menunjukkan bahwa wartawan sebagai bagian dari media massa terkadang memberi kritikan dan juga masukan terhadap kegiatan atau objek wisata yang sedang diliput untuk kemudian diberitakan dengan tujuan agar kedepannya ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya yang kemudian akan menjadi daya tarik bagi para pembaca berita tersebut.

**Gambar 3.2 Model *Quadruple Helix* Dalam Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo**



Sumber: Olah Data Peneliti, (2021)

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam pengembangan pariwisata desa wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang. Aktor-aktor tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan setiap aktor dalam

melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata desa wisata Wonolopo yakni bahwa DISBUDPAR Kota Semarang menjadi aktor primer dan berperan sebagai *policy cerator*, fasilitator dan koordinator. Aktor primer adalah POKDARWIS, RW, dan Masyarakat Aktif berperan sebagai implementor dan akselerator. Aktor sekunder adalah Media Massa dan Akademisi berperan sebagai akselerator. Aktor tersier adalah Kecamatan, Kelurahan dan PKK berperan sebagai akselerator. Aktor kwarter adalah Masyarakat Pasif berperan sebagai kelompok sasaran dan penerima manfaat. Model jaringan aktor yang terbentuk dalam pengembangan pariwisata desa wisata Wonolopo Kecamatan Mijen Kota Semarang adalah Model *Quadruple Helix*. Adapun aktor yang terlibat diantaranya Pemerintah (DISBUDPAR Kota Semarang, Kecamatan Mijen, Kelurahan Wonolopo), Universitas atau Akademisi (Universitas Stikubank Semarang dan Universitas Negeri Semarang), Media Massa (Suara Merdeka Semarang, Indosiar dan Metro TV Semarang), Masyarakat Aktif (RW, POKDARWIS Wonolopo dan Manggar, PKK Kelurahan Wonolopo, pemilik objek wisata, pemandu wisata dan pelaku UMKM) yang kemudian membentuk sebuah jaringan aktor tetapi sesuai fakta yang ada dilapangan, jaringan aktor yang terbentuk masih belum berjalan maksimal

hal ini diakibatkan oleh aktor yang terlibat belum melaksanakan peran nya secara penuh sebagaimana semestinya serta jalur koordinasi antar aktor yang belum terjalin dengan baik. Hal ini dapat di ketahui dari adanya aktor yang masih belum melakukan komunikasi yang baik antar aktor serta terdapat beberapa aktor yang sama sekali belum melakukan koordinasi dengan aktor lainnya sehingga mengakibatkan adanya miskomunikasi bahkan konflik di beberapa aktor Sedangkan untuk sektor swasta belum melibatkan dirinya dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Wonolopo. Seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan sebuah kebijakan bantuan dana adalah salah satu faktor penting yang harus di penuhi dan harus di pastikan dapat mencukupi biaya pelaksanaan sebuah kebijakan tersebut. Di ketahui dalam pengembangan pariwisata desa wisata Wonolopo memang pemerintah kota sudah memberikan dana namun sejauh ini masyarakat serta pemerintah setempat merasa dana yang di berikan belum cukup untuk membiayai pelaksanaan kebijakan pengembangan serta proses pencairan dana yang relative membutuhkan waktu yang lebih lama, berbeda dengan pihak swasta yang pada umumnya mampu memberikan suntikan dana yang lebih besar dan proses yang lebih cepat jika sudah melakukan kontrak hubungan kerja sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Anuar, A. N. A., Ahmad, H., Jusoh, H., & Hussain, M. Y. (2013). Policy and tourism development strategy towards tourist friendly destination in Kuala Lumpur. *Asian Social Science*, 9(2), 180–190. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n2p180>
- Aref, <sup>1</sup>fariborz, Gill, S., & Aref, <sup>3</sup>farshid. (2010). Tourism Development in Local Communities: As a Community Development Approach. *Journal of American Science*, 6(2), 155–161. <http://www.americanscience.org>
- Aziz, R. C. (2018). Tourism development in rural areas: potentials of appreciative inquiry approach. *Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts*, 10(1), 59–75.
- Chen, Yeong-Shyang & Shou-Tsung Wu. (2021). An exploration of actor-network theory and social affordance for the development of a tourist attraction: A case study of a Jimmy-related theme park, Taiwan. *Journal Tourism Management*. Shih Chien University Kaoshiung Campus.
- Geogra, F., & Gadjah, À. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 129–139. <https://doi.org/10.22146/kawistara.39>

- Fitari, Y., & Ma'rif, S. (2017). Manfaat Pengembangan Desa Wisata Wonolopo terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat Lokal. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 5(1), 29. <https://doi.org/10.14710/jwl.5.1.29-44>
- Formica, S., & Kothari, T. H. (2008). Strategic destination planning: Analyzing the future of tourism. *Journal of Travel Research*, 46(4), 355–367. <https://doi.org/10.1177/0047287507312410>
- H. Ismail Nawawi. (2009). *PUBLIC POLICY Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek* (1st ed.). Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Johannesson, G., Ren, C., van der Duim, R., & Munk, A. (2014). Actor-Network Theory and Tourism Research: approaches, implications and future opportunities. *Tourism Methodologies*, February 2017, 119–136.
- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. (2010). Laporan Akhir Kajian Dampak Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia. Jakarta: Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Rifiyan, M Andi & Andri Sulistyani. (2016). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Eko-Budaya Vol. 1. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
- Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit. P, C, S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Parawisata Indonesia Pada Asean Economic Community. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vo.8 (2): 163 – 176. doi: 10.15408/ess.v8i2.5928.
- Solahuddin Kusumanegara. (2010). *PUBLIK, Model & Aktor Dalam Proses KEBIJAKAN* (1st ed.). Yogyakarta: Gava Media.
- Sri Suwitri. (2008). Jejeran Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan Publik Suatu Kajian tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang. Semarang.
- Stinson, M. J., & Grimwood, B. S. R. (2019). On actor-network theory and anxiety in tourism research. *Annals of Tourism Research*, 77(December 2018), 141–143. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.12.003>
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (21st ed.). Bandung: ALFABETA.
- Suparwoko, W. (2012). Tourism Development in Indonesia. *Towards Responsible Tourism: A Community-Based Approach to Tourism Development in Indonesia*, February, 62–68. <https://doi.org/10.13140/2.1.4103.2485>
- Trianggono, B., Wiloso, P. G., & Sasongko, G. (2018). Pariwisata Dalam Perspektif Actor Network Theory (Studi Kasus Top Selfie Pinusan Kragilan Desa Pogalan, Jawa Tengah, Indonesia). *Jurnal Pariwisata Pesona*, 3(2), 91–104. <https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2414>
- Trisnawati, A. E., Wahyono, H., & Wardoyo, C. (2018). Pengembangan Desa Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 3(1), 29–33.

<https://doi.org/10.17977/JPTPP.V3I1.10356>

- Yoeti, H. O. A. (2016). *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata* (3rd ed.). Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka (Persero).
- Yuniningsih, Tri., Darmi, T., & Sulandari, S. (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 84. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p84-93>.
- Yuniningsih, Tri & Neni Sriwahyuni (2019). Model Pentahelik Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation*, Vol. 3, No. 2, Mei Tahun 2019, (84 – 93).

#### Website

- Setiawan, Mihammad Arief. (2017). Laporan Pendahuluan Rpplh Kota Semarang Tahun 2017. Diakses melalui [Laporan Pendahuluan Rpplh Kota Semarang \(scribd.com\)](#) pada tanggal 7 Juli 2020 Pukul 13:20 WIB.
- Habib, Naufal. (2020). Laporan Analisis Wilayah Kabupaten Kendal. Diakses melalui [Laporan Analisis Wilayah Kabupaten Kendal by Naufal Habib - issuu](#) pada tanggal 17 Juli 2020 Pukul 20:15 WIB.
- Pratama, Andika. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun (2014). Diakses melalui [RKPD-2014-full \(scribd.com\)](#) pada tanggal 9 April 2020 Pukul 10:45 WIB.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Semarang. (2016). Diakses melalui PPID – Disbudpar Pemerintah Kota Semarang ([semarangkota.go.id](http://semarangkota.go.id)) pada tanggal 30 Maret 2020 Pukul 17:48 WIB.
- Laksamana, Rifal. (2015). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kemandirian Pangan Di Kabupaten Subang (Studi Kasus: Desa Belendung, Kecamatan Cibongo) pada tanggal 19 Mei 2020 Pukul 11:23 WIB.
- Pambudi, Novian. (2017). Desa Wisata Kampung Jamu Wonolopo. Diakses melalui Desa Wisata Kampung Jamu Wonolopo – Selamat Datang! (Wordpress.Com) pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 20:25 WIB.
- Kota Semarang, P. (2016). *Peraturan Daerah Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 Pemerintah Kota Semarang*. 370. <https://drive.google.com/file/d/0BzCSRGPA6gIAV3ZENzRmalQycGc/view>
- Setya, M. V. (2017). *Semarang Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Kota Semarang*.
- Susman, Lanny Ratna. (2018). Bab II Landasan Teori. Diakses melalui <https://docplayer.info/61400810-Bab-ii-landasan-teori.html> pada tanggal 27 juni 2020 Pukul 14:16 WIB.
- Tjang, Toton. Teori ANT Bruno Latour. (n.d.). Diakses melalui [https://www.academia.edu/5530013/teori\\_Ant\\_Bruno\\_Lataour](https://www.academia.edu/5530013/teori_Ant_Bruno_Lataour) pada tanggal 24 April 2020 Pukul 18:37 WIB.
- Samiri, Muliani. (2019). Analisis Jaringan Aktor Dalam Implementasi Kebijakan Teori dan Praktek. Diakses melalui <https://www.academia.edu/38579375>

[/Analisis Jaringan Dalam Implementasi Kebijakan Teori Dan Praktek](#) pada tanggal 3 Februari 2020 Pukul 15:22 WIB.

Aini, Nurul. (2018). Implementasi Etika Administrasi Publik Terkait Perannya Dalam Mewujudkan Good Governance. Diakses melalui [https://www.academia.edu/38018460/Implementasi Etika Administrasi Publik Terkait Perannya Dalam Mewujudkan Good Governance](https://www.academia.edu/38018460/Implementasi_Etika_Administrasi_Publik_Terkait_Perannya_Dalam_Mewujudkan_Good_Governance) pada tanggal 5 Februari 2020 Pukul 09:11 WIB.

Tujuan Sustainable Development Goals. (n.d.). Diakses melalui <https://www.sdg2030indonesia.org/page/20-tujuan-duabelas> pada tanggal 23 November 2020 Pukul 20:24 WIB.

## **Dokumen**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataaan

Surat Keputusan Walikota Kota Semarang Nomor 556/407 Tahun 2012 Tentang Penetapan Desa Wisata di Kota Semarang.